

Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer

<https://rapik.pubmedia.id/index.php/rapik>

Dampak *Open Door Policy* Pada Stabilitas Ekonomi dan Politik Jerman serta Hubungan dengan Uni Eropa

Ratu Zahirah Lutfie¹, Wanda Opranata², Nanda Riyadinta³, Hardi Alunaza^{4*}

¹²³⁴ Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Jln Prof Dr. Hadari Nawawi Pontianak, 78124

Email: ¹rlutfie@fisip.untan.ac.id, ²wandaoprn20@gmail.com, ³nandariyadinta@gmail.com, ⁴hardi.asd@fisip.untan.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Send 10/04/2024

Received 26/05/2024

Accepted 24/06/2024

Abstract

During a period when Europe was facing a crisis and several countries were turning away refugees, Germany chose to welcome them and emerged as a key destination for refugees from different countries. The country's decision to adopt the Open Door Policy has had a profound effect on its stability, leading to notable economic and political consequences both within Germany and in its diplomatic relations with the European Union throughout the policy's duration. This study analyzes the stability of Germany's policy in managing refugees from 2015 to 2022, which was one of its responses to the European refugee crisis with qualitative approach. The policy faced criticism from segments of the German public, particularly opposition party members, and also drew scrutiny from some European Union member states. Moreover, it has had long-term effects on the economic and demographic sectors. Merkel, as Germany's Chancellor who introduced the policy, was undeterred by criticisms directed at her approach.

Keywords: *Open Door Policy, Economic Stability, Refugees, European Union.*

Abstrak

Ketika Eropa menghadapi krisis dan beberapa negara menolak para pengungsi, Jerman membuka pintunya dan menjadi salah satu tujuan utama bagi pengungsi dari berbagai negara. Keputusan Jerman untuk menerapkan *Open Door Policy* telah memengaruhi stabilitas negara dan menimbulkan berbagai dampak, baik di bidang ekonomi maupun politik, baik di tingkat domestik maupun dalam hubungan multilateralnya dengan Uni Eropa selama kebijakan ini diterapkan. Penelitian ini akan menganalisis stabilitas dari kebijakan yang diterapkan dalam menangani pengungsi pada tahun 2015-2022 yang merupakan salah satu respons Jerman terhadap krisis pengungsi yang terjadi di Eropa dengan pendekatan kualitatif. Penelitian Kebijakan Jerman tersebut menuai kritik dari beberapa warga Jerman yang berasal dari partai oposisi serta beberapa negara Uni Eropa juga memberikan dampak jangka panjang dalam sektor ekonomi dan demografis. Merkel, selaku Kanselir Jerman yang menerapkan kebijakan tersebut, tidak mempermasalahkan kritik yang ditujukan pada kebijakannya.

Kata kunci: *Open Door Policy, Stabilitas Ekonomi, Pengungsi, Uni Eropa.*

^{*}Penulis Korespondensi

E-mail : hardi.asd@fisip.untan.ac.id

PENDAHULUAN

Krisis pengungsi adalah situasi di mana sejumlah besar orang terpaksa meninggalkan negara asal mereka karena alasan yang mengancam keselamatan, kehidupan, atau kebebasan mereka. Krisis ini biasanya dipicu oleh faktor-faktor seperti perang, kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, konflik etnis atau agama, bencana alam, dan ketidakstabilan politik. Pengungsi tersebut sering kali mencari perlindungan di negara lain yang aman, namun dihadapkan pada tantangan besar dalam hal penerimaan, integrasi, dan pemenuhan hak-hak dasar mereka. Krisis pengungsi yang muncul pada abad ke-21 telah menciptakan dinamika baru dalam hubungan internasional, memberikan peluang bagi negara-negara dan organisasi internasional untuk berperan lebih aktif dalam menyelesaikan masalah kemanusiaan. Isu pengungsi tidak hanya berdampak pada negara asal, tetapi juga menjadi tanggung jawab kolektif komunitas internasional (Sopamena, 2023). Salah satu kawasan yang menjadi episentrum dari krisis ini adalah Timur Tengah, dengan Suriah sebagai salah satu contohnya. Konflik di Suriah yang dimulai pada Maret 2011, sebagai bagian dari gelombang Arab Spring, berkembang menjadi perang saudara yang berbeda dari pemberontakan di negara-negara Arab lainnya. Sementara negara-negara lain di kawasan tersebut mampu mengatasi pemberontakan, konflik di Suriah justru terus bereskalasi (Heriamsal, Manurung and Rahmat, 2024).

Tindakan represif dari pemerintah Bashar al-Assad terhadap gerakan rakyat sipil semakin memperburuk situasi, yang kemudian menyebabkan ketidakstabilan yang berkepanjangan. Suriah menjadi salah satu negara dengan tingkat ketidakamanan tertinggi dan dikeluarkan dari Liga Arab, Organisasi Kerjasama Islam, serta Persatuan Negara Mediterania (Fahham and Kartaatmaja, 2014). Konflik ini juga diperparah oleh intervensi dari berbagai kekuatan asing yang memiliki kepentingan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Akibatnya, krisis ini memicu gelombang pengungsi yang terus meningkat, dengan negara-negara Eropa, terutama Jerman, menjadi tujuan utama mereka (Setiabudi, 2021).

Pada tahun 2015, lebih dari 1,25 juta permohonan suaka diajukan ke negara-negara Eropa, dengan Jerman menjadi salah satu tujuan utama pengungsi, khususnya dari Suriah (Sherin, Nugrahaningsih and Nuzulian, 2021). Sebagai anggota utama Uni Eropa, Jerman merespons krisis ini dengan menerapkan *Open Door Policy* yang diprakarsai oleh Kanselir Angela Merkel. Kebijakan ini dirancang sebagai tanggapan terhadap krisis pengungsi yang melanda Eropa, di mana banyak negara anggota Uni Eropa lainnya memilih untuk menutup perbatasan mereka. Sebaliknya, Jerman membuka pintu bagi pengungsi Suriah, melihatnya sebagai peluang untuk mengatasi tantangan demografis internal, seperti penuaan populasi dan kekurangan tenaga kerja (Agestia *et al.*, 2023).

Namun, kebijakan ini tidak lepas dari berbagai tantangan, baik dari segi ekonomi maupun politik. Dari sisi ekonomi, integrasi pengungsi memerlukan alokasi sumber daya yang besar, termasuk penyediaan perumahan, layanan kesehatan, pendidikan, hingga pelatihan kerja. Hal ini memicu perdebatan mengenai bagaimana anggaran negara harus dialokasikan dan dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat Jerman secara keseluruhan. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa masuknya pengungsi dalam jumlah besar akan

memicu ketegangan sosial, mengingat perbedaan budaya yang signifikan antara pengungsi dan masyarakat setempat (Maureen, Aling and Senewe, 2024).

Secara politik, *Open Door Policy* membawa Jerman ke dalam posisi yang sulit, baik di dalam negeri maupun di panggung internasional. Di satu sisi, Jerman dipuji atas komitmen kemanusiaannya, namun di sisi lain, kebijakan ini memicu ketegangan politik domestik, terutama dengan munculnya gerakan sayap kanan seperti *Alternative für Deutschland* yang menentang kebijakan ini (Andiyani, Triristina, and Iskandar, 2024). Selain itu, hubungan Jerman dengan Uni Eropa menjadi semakin rumit akibat dampak jumlah pengungsi yang terus bertambah. Meskipun Jerman terus memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Suriah, hubungan diplomatik dengan pemerintahan Assad tetap membeku, sejalan dengan sikap Jerman yang menolak legitimasi rezim Assad dan mendukung solusi damai melalui PBB.

Studi menggunakan dua literatur utama sebagai rujukan penelitian terdahulu. Pertama, pada penelitian berjudul *Kepentingan Jerman Dalam Kebijakan Flüchtlinge Willkommen* (Selamat Datang Pengungsi) Tahun 2015 oleh Mila Andriai menjelaskan bahwa Jerman mengalami masalah demografi dimana angka kelahiran terus menurun (Mila, 2018). Jerman menghadapi masalah penuaan populasi, di mana jumlah penduduk yang berada di usia produktif lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah yang sudah memasuki usia non-produktif. Kehadiran para pengungsi dianggap dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan ini dan berperan dalam memperbaiki komposisi pasar tenaga kerja di Jerman. Tulisan kedua, berjudul *motivasi Jerman Menerima Pengungsi Asal Timur Tengah Tahun 2015*. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Jerman menerima pengungsi asal Suriah karena berhubungan dengan kepentingan nasionalnya yakni Keuntungan jangka panjang yang diperoleh Jerman terkait kedatangan pengungsi adalah potensi penguatan sektor tenaga kerja yang pada akhirnya dapat memperkuat perekonomian negara. Berdasarkan data penuaan populasi yang dirilis oleh Komisi Eropa, jumlah penduduk Jerman diprediksi akan menurun dari 81,3 juta pada 2013 menjadi 70,8 juta pada 2060. Jerman diperkirakan akan menghadapi kekurangan penduduk usia produktif yang dapat mengancam sektor ketenagakerjaan. Untuk itu, Jerman berupaya menjaga keberlanjutan pasar tenaga kerjanya yang terancam oleh depopulasi akibat penuaan, dengan memanfaatkan para imigran untuk mengisi kekosongan tersebut (Yeni, 2019).

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan menghubungkan Jerman dengan kebijakan penerimaan pengungsi, khususnya dari Timur Tengah, dalam konteks penguatan sektor tenaga kerja. Meskipun penelitian terdahulu telah membahas masalah demografi dan dampak kedatangan pengungsi terhadap pasar tenaga kerja, penelitian ini mengusulkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan melihat interaksi antara kebijakan imigrasi dan strategi pencegahan depopulasi. Selain itu, penelitian ini memperkenalkan analisis tentang bagaimana kebijakan *Flüchtlinge Willkommen* 2015 tidak hanya sebagai respons terhadap krisis kemanusiaan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya Jerman untuk mempertahankan stabilitas ekonomi jangka panjang melalui revitalisasi tenaga

kerja produktif. Dengan mengintegrasikan data demografi terbaru dari Komisi Eropa, penelitian ini mengisi kekosongan pemahaman mengenai dampak kebijakan imigrasi terhadap keberlanjutan ekonomi Jerman di masa depan, serta memberikan pandangan baru mengenai peran pengungsi dalam mengatasi tantangan penuaan populasi di negara tersebut.

Tulisan ini memberikan perspektif baru tentang dampak kebijakan *Open Door Policy*, tidak hanya pada dinamika politik domestik dan ekonomi Jerman, tetapi juga pada hubungan Jerman dengan Uni Eropa. Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dibahas dalam paper ini mencakup dampak *Open Door Policy* terhadap kondisi ekonomi dan politik di Jerman, serta pengaruh kebijakan ini terhadap hubungan multilateral Jerman dengan negara-negara anggota Uni Eropa. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa *Open Door Policy* memiliki dampak jangka panjang yang signifikan pada struktur ekonomi domestik Jerman dan turut membentuk arah kebijakan luar negeri Jerman dalam hubungannya negara-negara di kawasan Uni Eropa. Kajian ini menjadi penting karena kebijakan imigrasi adalah isu global yang terus berkembang, dan pengalaman Jerman dapat menjadi acuan bagi negara-negara lain yang menghadapi krisis pengungsi. Paper ini bertujuan memberikan perspektif baru dalam memahami keterkaitan antara kebijakan domestik dan kebijakan luar negeri di era globalisasi, terutama dalam konteks migrasi massal dan krisis kemanusiaan.

Tulisan ini dibatasi pada tahun 2015 yaitu tahun pertama diimplementasikan sebuah kebijakan yang dikenal dengan *Open Door Policy* yang dibuat oleh Kanselir Jerman yaitu Angela Merkel, hingga tahun 2022, karena tahun ini merupakan tahun dimana kebijakan tersebut mulai dirubah secara signifikan dan pengimplementasiannya sudah tidak diterapkan secara resmi. Tulisan ini juga berfokus pada dampak dari *Open Door Policy* pada stabilitas ekonomi dan politik jangka panjang di Jerman serta pengaruhnya terhadap hubungan multilateral dengan Uni Eropa, tanpa mengeksplorasi secara mendalam aspek hukum atau sosial-budaya dari integrasi pengungsi di Jerman.

METODE PENELITIAN

Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis suatu kondisi yang bersifat alami, dimana letak penelitian adalah sebagai instrument utama, teknik pengumpulan data dan analisis menekankan pada makna secara keseluruhan (Sugiyono, 2010). Hal ini berarti fokus penelitian kualitatif adalah pada proses dan pemaknaan hasil. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis, mendeskripsikan, dan menguraikan fenomena atau obyek penelitian dari sudut pandang penulis berdasarkan kajian pustaka yang menunjang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sumber data sekunder berupa studi literatur yang relevan dengan topik pembahasan dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Dengan studi kepustakaan penulis akan mengumpulkan dan menyeleksi data-data sekunder yang bersumber dari buku, surat kabar, jurnal, dan sebagainya yang berhubungan dengan topik. Selanjutnya penulis akan menyajikan data dalam bentuk deskripsi yang kemudian akan ditarik kesimpulan untuk dapat menjawab permasalahan yaitu dampak *Open Door Policy* yang diterapkan oleh Jerman terhadap dinamika ekonomi, politik domestik, serta hubungan bilateral Jerman dengan Suriah. Tulisan ini kemudian diuji dengan teknik analisis data

berdasarkan Miles Huberman dengan tiga tahapan yakni pengumpulan data, pemilahan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan (Fadli, 2021).

HASIL DAN DISKUSI

Dampak Pada Stabilitas Ekonomi dan Politik di Jerman

Open Door Policy yang diterapkan Jerman pada tahun 2015, yang memungkinkan masuknya sejumlah besar pengungsi, terutama dari negara-negara konflik seperti Suriah, Irak, dan Afghanistan, telah memberikan dampak yang signifikan terhadap dinamika politik domestik dan ekonomi negara tersebut. Salah satu dampak paling mencolok dari *Open Door Policy* adalah terjadinya polarisasi politik di dalam negeri. Kebijakan ini memicu perdebatan tajam antara mereka yang mendukung kebijakan tersebut, terutama dari kalangan progresif dan beberapa partai politik seperti Partai Hijau, dan mereka yang menentangnya, terutama dari kelompok konservatif dan populis. Partai sayap kanan memperoleh dukungan yang lebih besar dengan mengkritik kebijakan imigrasi ini sebagai ancaman terhadap identitas budaya Jerman dan mengklaim bahwa pengungsi akan membebani sistem sosial dan ekonomi negara (Agestia *et al.*, 2023).

Keputusan Kanselir Angela Merkel untuk membuka pintu bagi pengungsi tanpa adanya persiapan yang matang, baik dalam hal logistik maupun integrasi sosial, menyebabkan ketidakpuasan yang meluas. Banyak warga merasa kebijakan ini tidak dipertimbangkan dengan cukup hati-hati, yang pada gilirannya menurunkan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Hal ini memperburuk ketegangan politik internal, yang terlihat dalam penurunan popularitas Partai Kristen Demokrat di beberapa jajak pendapat. *Open Door Policy* juga turut memperburuk polarisasi politik dengan meningkatnya radikalisasi di kedua sisi spektrum politik. Di satu sisi, kelompok yang mendukung kebijakan ini semakin memperkuat pandangan mereka tentang kemanusiaan dan multikulturalisme, sementara di sisi lain, kelompok yang menentangnya semakin menyuarakan narasi nasionalisme dan anti-imigrasi (Howarth and Schild, 2022). Hal ini sering terlihat dalam protes, demonstrasi, dan pernyataan politik yang semakin memecah belah masyarakat.

Kebijakan ini memperburuk ketegangan antara penduduk lokal dan pengungsi, terutama di kota-kota besar yang menerima jumlah pengungsi terbesar. Meskipun banyak warga Jerman yang mendukung kebijakan ini, ada juga yang merasa bahwa kedatangan pengungsi akan menyebabkan beban sosial dan ekonomi tambahan, meningkatkan persaingan di pasar kerja, dan mengurangi kualitas layanan sosial. Hal ini menciptakan ketegangan antara kelompok yang menyambut pengungsi dan kelompok yang merasa terganggu oleh kehadiran mereka. Salah satu dampak sosial yang signifikan adalah peningkatan sentimen rasisme dan xenofobia (Major and Mölling, 2020). Beberapa kelompok yang menentang kebijakan imigrasi merasa bahwa kedatangan pengungsi, khususnya dari negara-negara non-Eropa, akan mengancam budaya dan identitas Jerman. Perasaan ini diperburuk oleh insiden-insiden kekerasan, kejahatan, dan ketidakcocokan budaya yang beberapa kali diberitakan media, yang semakin memperburuk ketakutan dan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat Jerman. Kebijakan *Open Door* memperburuk polarisasi ini dengan memperburuk stereotip dan diskriminasi terhadap pengungsi (Putri, Haqqi and Alchatib, 2022).

Keamanan menjadi isu utama dalam polarisasi sosial yang muncul. Beberapa pihak mengklaim bahwa kebijakan ini membuka pintu bagi radikalisasi dan meningkatkan ancaman terorisme, meskipun data menunjukkan bahwa pengungsi

cenderung tidak terlibat dalam tindak kriminal atau ekstremisme lebih tinggi dibandingkan warga negara Jerman. Namun, ketakutan terhadap kemungkinan ancaman ini semakin memperburuk ketegangan sosial dan mendorong perpecahan di dalam masyarakat. Selain itu, isu integrasi menjadi tantangan besar, karena perbedaan budaya, bahasa, dan agama menambah lapisan kesulitan dalam proses integrasi sosial pengungsi. Kebijakan *Open Door* juga memicu perdebatan lebih besar tentang identitas nasional Jerman dan masa depannya sebagai masyarakat multikultural. Bagi sebagian orang, kebijakan ini menjadi kesempatan untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan beragam. Namun, bagi sebagian lainnya, kebijakan ini dianggap sebagai ancaman terhadap homogenitas budaya Jerman (Weg, Germany and Siebert, 2004). Polarisasi ini akan terus berlanjut seiring dengan semakin banyaknya pengungsi yang berhasil diintegrasikan ke dalam masyarakat Jerman.

Masalah demografi (*ageing population*) menjadi tantangan utama bagi Jerman, hal ini ditandai oleh beberapa fenomena seperti angka kelahiran yang rendah, usia harapan hidup masyarakat yang meningkat serta kondisi masyarakat yang menua. Berdasarkan data dari *Statistisches Bundesamt* atau *German Federal Statistical Office* yang merupakan kantor Statistic Federal Jerman, menunjukkan adanya tren peningkatan jumlah penduduk usia 60-80 tahun dan usia 80 tahun atau lebih di Jerman, yang diprediksi akan terus mengalami kenaikan di tahun-tahun mendatang. Permasalahan kependudukan ini tentu akan menimbulkan dampak terhadap banyak hal termasuk pertumbuhan perekonomian Jerman. Hal ini berdampak pada produktivitas Jerman sebagai negara industri yang akan mengalami pelemahan dan mengancam pertumbuhan ekonomi Jerman. Kurangnya tenaga kerja produktif di Jerman mengakibatkan banyak nya terjadi kekeosongan pekerjaan tertentu di Perusahaan-perusahaan sehingga permintaan akan tenaga kerja akan semakin tinggi, permasalahan ini dapat diatasi salah satunya melalui masuknya pengungsi usia produktif.

Pengungsi sebagai tenaga kerja produktif secara ekonomi dapat memberikan kontribusi kepada negara melalui pembayaran pajak (*Tax Payer*). Pengungsi sebagai tenaga aktif produktif dapat berkontribusi terhadap negara secara ekonomi dengan membayar pajak. Pengungsi sebagai tenaga kerja di Jerman akan dikenakan kewajiban pembayaran pajak, dalam hal ini khususnya pajak penghasilan, sebagaimana tenaga kerja atau karyawan Jerman lainnya. Di Jerman, Pengungsi yang bekerja diwajibkan untuk membayar pajak, khususnya pajak penghasilan, sama seperti pekerja lokal lainnya. Mengenai peran imigran sebagai pembayar pajak di Jerman, Menteri Keuangan Wolfgang Schäuble menyatakan bahwa negara tidak ingin menambah utang dengan meminjam uang, sehingga mereka memilih untuk menjaga anggaran seimbang hingga tahun 2020. Schäuble mengusulkan bahwa untuk menutupi kekurangan anggaran, sebagian pendapatan dapat diperoleh dari pajak, termasuk pajak penghasilan yang dibayarkan oleh pengungsi yang bekerja secara produktif. Hal ini dikarenakan umumnya pajak berasal dari pembayaran tenaga kerja produktif, sehingga dalam hal ini imigran sebagai tenaga kerja produktif menjadi subjek pajak di Jerman atas penghasilannya yang didapatkan di Jerman. Dengan demikian, terdapat kepentingan Jerman terkait kontribusi pengungsi sebagai *tax payer* sebagai kelanjutan dari keberadaan imigran sebagai tenaga kerja produktif di Jerman.

Bagi pemerintah Jerman, kedatangan pengungsi membawa dampak positif dari sisi ekonomi. Pengungsi yang merupakan tenaga kerja dengan usia produktif dapat menguntungkan Jerman dalam bentuk peluang ekonomi untuk membantu Perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja Menurut perkiraan kantor tenaga

kerja (*labor office*) di Jerman, lapangan pekerjaan masih meningkat 36.000 per bulan pada tahun 2016, dan jumlah pengungsi yang menganggur meningkat sekitar 10.000 per bulan. Untuk itu pemerintah Jerman telah menyiapkan program pelatihan untuk mempercepat pengungsi memasuki pasar tenaga kerja di Jerman. Pekerjaan-pekerjaan yang ditawarkan bagi pengungsi merupakan kategori baru pekerjaan dengan upah yang rendah untuk mereformasi sistem kesejahteraan sosial Jerman.

Pemerintah Jerman telah mengambil berbagai langkah untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja imigran sebagai solusi menghadapi dampak dari populasi yang menua. Beberapa upaya tersebut meliputi: penyelenggaraan kursus bahasa Jerman untuk pengungsi, pelatihan kejuruan dan keterampilan kerja untuk mengintegrasikan angkatan kerja, serta program pekerjaan berketerampilan rendah. Upaya ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat federal, regional, dan kota. Selain itu, untuk mempercepat proses integrasi imigran ke dalam pasar tenaga kerja, pemerintah Jerman telah mengalokasikan dana sebesar 300 juta Euro per tahun untuk program pelatihan dan dukungan bagi Imigran, untuk menyediakan majikan yang murah dan bersubsidi.

Implementasi *Open Door Policy* yang diterapkan oleh Angela Merkel pada tahun 2015 juga membawa dampak yang signifikan, terutama dalam koalisi pemerintahan. Pada awalnya, kebijakan ini mendapat dukungan yang sangat luas dari berbagai pihak, termasuk dari partai koalisi Christian Democratic Union (CDU)/Christian Social Union (CSU) dan Social Democratic Party of Germany (SPD), yang membuka lebar perbatasannya untuk menerima pengungsi sebagai bagian dari komitmen nilai kemanusiaan Jerman. Angela Merkel, sebagai Kanselir, menyampaikan dalam beberapa kesempatan bahwa Jerman akan selalu siap membantu pengungsi salah satunya dengan memberikan dukungan dalam belajar bahasa dan integrasi ke dalam pasar kerja. Pendekatan ini bertujuan untuk merangkul para pengungsi sebagai bagian baru dari masyarakat Jerman.

Namun, seiring waktu, kebijakan ini mulai menimbulkan perpecahan politik. Partai CSU yang berafiliasi dengan CDU, khususnya di wilayah Bavaria, mulai mengkritik kebijakan tersebut dan menyerukan kebijakan imigrasi yang lebih ketat. Konflik ini menambah ketegangan antara CDU dan CSU, sementara SPD dan CDU juga menghadapi perbedaan pandangan mengenai batas jumlah pengungsi yang dapat diterima oleh Jerman. Selain itu, munculnya partai sayap kanan seperti AfD (*Alternative für Deutschland*) memperlihatkan adanya kekuatan di tingkat masyarakat. AfD, yang didukung oleh gerakan anti-imigran PEGIDA, berhasil meraih dukungan dengan narasi nasionalis dan retorika anti-imigrasi. Partai ini menekankan bahwa para pengungsi, terutama yang berasal dari Suriah, dapat membawa ancaman terorisme dan beban ekonomi bagi Jerman (L. Khasanah, 2022)

Pada awalnya, warga Jerman menunjukkan dukungan yang sangat tinggi kepada para pengungsi, tetapi seiring bertambahnya jumlah pengungsi dan meningkatnya ketegangan sosial, kekhawatiran mulai muncul di benak masyarakat. AfD memanfaatkan isu tersebut dengan menggambarkan imigran sebagai ancaman terhadap identitas budaya dan keamanan Jerman. Sentimen ini memperkuat dukungan masyarakat terhadap AfD, yang pada akhirnya berhasil masuk ke Bundestag setelah pemilu 2017, mengubah sudut pandang politik Jerman dengan memperkenalkan isu imigrasi sebagai fokus utama dalam kampanye.

Pemerintah Jerman menghadapi tekanan dari berbagai pihak dan mulai menerapkan kebijakan yang lebih membatasi, seperti kontrol perbatasan sementara dan pembatasan jumlah pengungsi. Kebijakan baru ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara komitmen terhadap nilai kemanusiaan Jerman dan kebutuhan dalam menjaga stabilitas sosial, juga mendorong Uni Eropa untuk menyepakati distribusi pengungsi yang lebih adil dan merata antar negara anggota. Kebijakan imigrasi ini tidak hanya mengubah dinamika politik domestik, tetapi juga memunculkan tantangan baru dalam menjaga solidaritas di kawasan Eropa dan mendiskusikan kembali mengenai identitas nasional serta tanggung jawab kemanusiaan di Jerman.

Dampak Pada Hubungan Jerman dengan Uni Eropa

Open Door Policy yang diterapkan oleh Jerman pada tahun 2015, yang memungkinkan masuknya sejumlah besar pengungsi dari negara-negara yang dilanda konflik seperti Suriah, Irak, dan Afghanistan, memiliki dampak signifikan terhadap hubungan Jerman dengan negara-negara anggota Uni Eropa. Kebijakan ini tidak hanya memengaruhi dinamika politik dan sosial di dalam negeri Jerman, tetapi juga membawa implikasi besar pada kebijakan migrasi UE secara keseluruhan serta hubungan antarnegara anggota (Khaira, Yusra and Dermawan, 2022). Salah satu dampak langsung dari *Open Door Policy* adalah munculnya ketegangan antara Jerman dan negara-negara UE lainnya, terutama negara-negara Eropa Timur seperti Hongaria, Polandia, dan Slovakia, yang menentang keras kebijakan penerimaan pengungsi (Putri, Haqqi and Alchatib, 2022). Negara-negara ini menilai kebijakan Jerman sebagai langkah unilateral yang tidak melibatkan persetujuan kolektif dari seluruh anggota Uni Eropa. Mereka berpendapat bahwa penerimaan pengungsi harus didistribusikan secara merata di seluruh UE, dan tidak boleh diputuskan oleh satu negara saja, apalagi negara sebesar Jerman (Drewski and Gerhards, 2024).

Negara-negara ini, terutama yang dipimpin oleh pemerintah konservatif atau nasionalis, juga mengkritik kebijakan Jerman karena dianggap terlalu terbuka terhadap imigran, yang mereka pandang sebagai ancaman terhadap keamanan, identitas budaya, dan kestabilan sosial negara mereka (Tjaden and Heidland, 2024). Ketegangan ini semakin memperburuk hubungan antara negara-negara anggota Uni Eropa dalam hal kebijakan migrasi. Kebijakan *Open Door* Jerman mempercepat perdebatan dalam Uni Eropa mengenai kebijakan migrasi bersama. Meskipun Uni Eropa telah mengupayakan kebijakan migrasi bersama, pada kenyataannya, kebijakan ini terbukti sulit diimplementasikan secara merata di seluruh negara anggota. Keputusan Jerman untuk membuka pintu bagi pengungsi menciptakan kesenjangan antara negara-negara yang bersedia menerima pengungsi seperti Jerman, Swedia, dan Prancis dan negara-negara yang menolak atau enggan menerima pengungsi seperti Polandia, Hungaria, dan Republik Ceko (Futák-Campbell and Pütz, 2022).

Sebagai respons, Uni Eropa mencoba untuk memperkenalkan mekanisme pembagian pengungsi secara wajib relokasi kepada negara-negara anggota, yang akhirnya mendapat penolakan dari beberapa negara. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan Uni Eropa untuk menyepakati kebijakan migrasi yang koheren dan menyeluruh, mengakibatkan polarisasi di dalam blok politik ini (Bhavani Fonseca, 2019). Meskipun *Open Door Policy* Jerman menyebabkan ketegangan, hal ini juga memperkuat posisi Jerman sebagai pemimpin dalam pembentukan

kebijakan migrasi Uni Eropa. Jerman, dengan basis ekonomi yang kuat dan populasi besar, memiliki kemampuan untuk mempengaruhi arah kebijakan migrasi di tingkat Eropa. Kebijakan Jerman seringkali menjadi referensi utama dalam diskusi-diskusi di tingkat Uni Eropa tentang cara menangani krisis pengungsi (Otero-iglesias, 2014).

Di sisi lain, kebijakan tersebut menempatkan Jerman dalam posisi yang lebih dominan dalam negosiasi kebijakan migrasi, yang terkadang menciptakan ketegangan dengan negara-negara yang merasa bahwa kebijakan ini diterapkan tanpa konsultasi yang memadai. Meskipun demikian, Jerman tetap memainkan peran kunci dalam merumuskan langkah-langkah kebijakan, seperti mekanisme distribusi pengungsi dan perjanjian dengan negara-negara non-UE untuk membatasi aliran migrasi. Salah satu masalah utama yang muncul setelah kebijakan *Open Door* Jerman adalah kesulitan dalam mencapai kesepakatan mengenai pembagian beban pengungsi antar negara anggota. Meskipun Jerman menerima lebih banyak pengungsi, beberapa negara anggota UE menuntut pembagian tanggung jawab yang lebih adil. Negara-negara yang menolak sistem relokasi pengungsi, seperti Hungaria dan Polandia, menekankan bahwa mereka tidak memiliki kapasitas atau kesiapan untuk menampung pengungsi dalam jumlah besar. Ketegangan ini menyebabkan terbentuknya garis perbedaan yang tajam antara negara-negara Eropa Barat termasuk Jerman, Prancis, dan Swedia dan negara-negara Eropa Timur seperti Hungaria, Polandia, dan Slovakia.

Akibatnya, kebijakan migrasi Uni Eropa sering kali terhambat, dengan negara-negara anggota yang menolak relokasi pengungsi dan menuntut kebijakan yang lebih ketat terhadap imigrasi. Dalam jangka panjang, hal ini memperburuk kohesi dan solidaritas dalam Uni Eropa, karena ada ketidaksetujuan tentang cara menangani krisis migrasi. Ketidakmampuan Uni Eropa untuk merespons secara terkoordinasi terhadap krisis pengungsi memperburuk citra blok ini di mata dunia. Krisis ini mengungkapkan ketidakmampuan sistem UE untuk mengelola migrasi secara efektif, yang pada gilirannya memengaruhi hubungan antarnegara anggota. Negara-negara yang lebih terbuka terhadap imigrasi merasa bahwa mereka harus menanggung sebagian besar beban, sementara negara-negara yang lebih skeptis terhadap kebijakan tersebut merasa tidak adil dipaksa untuk berpartisipasi dalam sistem yang mereka anggap merugikan.

Kebijakan *Open Door* Jerman berkontribusi pada peningkatan ketegangan mengenai kebijakan kontrol perbatasan di seluruh Uni Eropa (Weg, Germany and Siebert, 2004). Beberapa negara anggota, seperti Austria dan beberapa negara Eropa Timur, merespons dengan memperketat kontrol perbatasan mereka setelah pengungsi mulai memasuki Jerman. Hal ini menyebabkan ketegangan tentang kebijakan *Schengen*, yang mengatur kebebasan bergerak di dalam wilayah Uni Eropa. Pengetatan perbatasan ini menciptakan ketegangan antara negara-negara yang ingin menjaga kebebasan bergerak dan negara-negara yang lebih memprioritaskan keamanan dan pengendalian imigrasi. Sebagai dampak dari kebijakan *Open Door*, ada peningkatan perhatian terhadap masalah keamanan dalam konteks migrasi di Uni Eropa (Howarth and Schild, 2022). Beberapa negara anggota khawatir bahwa kebijakan migrasi yang longgar akan membuka peluang bagi kelompok-kelompok ekstremis untuk memasuki Eropa. Meskipun tidak ada

bukti signifikan yang mendukung klaim ini, ketakutan terhadap potensi ancaman terorisme mempengaruhi kebijakan imigrasi dan keamanan di tingkat Uni Eropa. Negara-negara seperti Prancis, Belgia, dan Inggris menuntut pendekatan yang lebih ketat dalam pengawasan dan kontrol migrasi di wilayah Uni Eropa.

Open Door Policy yang dikeluarkan oleh Jerman pada tahun 2015, memiliki dampak yang mendalam terhadap hubungan Jerman dengan Uni Eropa yang mengakibatkan semakin banyaknya pengungsi yang masuk dalam jumlah besar (Major and Mölling, 2020). Kebijakan ini tidak hanya memengaruhi dinamika internal Jerman, tetapi juga menciptakan ketegangan dan perdebatan di antara negara-negara anggota Uni Eropa. Kebijakan ini dikeluarkan di tengah tengah meningkatnya krisis migrasi yang terjadi akibat konflik di Suriah dan negara-negara lain, yang menyebabkan jutaan pengungsi berusaha untuk keluar dari negaranya dan mencari suaka ke negara-negara Eropa. Jerman, di bawah kepemimpinan Kanselir Angela Merkel, mengadopsi sikap terbuka dengan mengumumkan bahwa mereka akan menerima pengungsi tanpa batasan, yang membuat Jerman menjadi tujuan utama bagi para pencari suaka (Klaeden, 1990).

Menanggapi melonjaknya jumlah pengungsi yang diterima oleh Jerman, Uni Eropa mengusulkan rencana untuk mengadakan distribusi kuota pengungsi. Rencana ini bertujuan untuk mendistribusikan pengungsi secara lebih merata di antara negara-negara anggota berdasarkan kriteria tertentu, termasuk ukuran populasi, produk domestik bruto, dan tingkat pengangguran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban yang ditanggung oleh negara-negara yang paling banyak menerima pengungsi, seperti Jerman, yang telah mengambil langkah signifikan dengan membuka pintunya bagi banyak pengungsi (Kundnani and Parello-Plesner, 2012).

Keputusan ini menimbulkan banyak pro dan kontra di seluruh Uni Eropa. Negara-negara dengan ekonomi yang lebih kuat, seperti Swedia dan Finlandia, menunjukkan sikap positif terhadap kebijakan Jerman dan juga membuka pintu bagi pengungsi. Mereka melihat tindakan Jerman sebagai langkah yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan sikap positif ini juga didorong oleh pandangan bahwa tindakan Jerman sejalan dengan nilai-nilai solidaritas Eropa (Knappertz, 2021). Negara-negara ini meyakini bahwa Uni Eropa harus berfungsi sebagai komunitas yang saling membantu, di mana negara-negara anggota mendukung satu sama lain dalam menghadapi tantangan bersama, termasuk krisis migrasi. Dengan demikian, mereka berpendapat bahwa semua negara anggota harus berkontribusi dalam menampung pengungsi, dan Jerman sebagai negara yang paling banyak menerima pengungsi memberikan contoh yang baik bagi negara-negara lain.

Hungaria dan Polandia adalah dua negara anggota Uni Eropa yang secara terbuka menolak *Open Door Policy* yang diterapkan oleh Jerman dan menolak untuk menerima kuota pengungsi yang ditetapkan oleh Uni Eropa (Sherin, Nugrahaningsih and Nuzulian, 2021). Mereka berpendapat bahwa kebijakan Jerman tidak hanya membebani negara-negara lain, tetapi juga berpotensi mengancam keamanan dan berpotensi mengganggu stabilitas di kawasan Eropa. Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orbán, bahkan menolak dengan tegas ide pembagian para pengungsi ke negara-negara Uni Eropa, dengan mengatakan bahwa pengungsi akan mengubah karakter budaya negara-negara Eropa. Selain itu, baik Hungaria maupun Polandia memiliki kekhawatiran serius mengenai keamanan nasional. Mereka berpendapat bahwa penerimaan pengungsi dapat meningkatkan risiko terorisme dan kriminalitas, dengan pemerintah kedua negara

sering kali merujuk pada kasus-kasus kejahatan yang melibatkan imigran sebagai bukti bahwa kebijakan terbuka berpotensi membahayakan warganya.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan, dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi dan politik Jerman. *Open Door Policy* memberikan angka harapan jangka panjang bagi Jerman yang menghadapi masalah aging population (penuaan populasi). Kehadiran imigran yang masuk ke Jerman melalui kebijakan ini membantu mengatasi kekurangan tenaga kerja, terutama di daerah-daerah yang mengalami penurunan jumlah penduduk. Secara ekonomi, kebijakan ini membantu memperkuat pasar tenaga kerja, mendorong pertumbuhan sektor industri, dan meningkatkan kontribusi sektor teknologi melalui integrasi tenaga kerja asing yang berkualitas. Kebijakan ini juga memicu ketegangan politik di Jerman, menghadirkan tantangan dalam hal integrasi sosial dan potensi ketegangan politik domestik. Ketegangan yang muncul terkait isu migrasi dan perbedaan pandangan mengenai kebijakan ini yang kemudian dapat mempengaruhi stabilitas politik dalam jangka pendek. Selain itu, *Open Door Policy* yang dikeluarkan oleh Jerman juga memiliki dampak yang mendalam terhadap hubungan Jerman dengan Uni Eropa, dengan dikeluarkannya usulan rencana untuk mengadakan distribusi kuota pengungsi dengan tujuan untuk meringankan beban yang ditanggung oleh Jerman, yang kemudian menuai pro dan kontra oleh negara-negara Uni Eropa. Bagi penelitian lanjutan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang kebijakan ini terhadap integrasi sosial dan stabilitas politik di Jerman. Penelitian ini dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi ketegangan sosial dan meningkatkan penerimaan terhadap imigran. Dalam konteks Uni Eropa, Jerman sebaiknya mendorong pembentukan kebijakan migrasi yang lebih terkoordinasi di antara negara anggota untuk berbagi beban migrasi secara adil. Selain itu, kerjasama dengan negara asal imigran perlu diperkuat guna mengatasi penyebab migrasi seperti konflik dan kemiskinan.

REFERENSI

- Agestia, N.R. *et al.* (2023) 'The Implementation of Open Door Policy in Dealing with the Syrian Refugee Crisis (A Case Study of Turkey- European Union Cooperation through the Emergency Social Safety Net Program 2016-2017)', *Jurnal of Middle East and Islamic Studies*, 10(1). Available at: <https://doi.org/10.7454/meis.v10i1.159>.
- Andiyani, EN., Triristina, N., Iskandar, WNR. (2024) Pengaruh Kebijakan Open Door Policy Terhadap Pergeseran Sosial di Jerman, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* 1 (2), p. 79-99.
- Bhavani Fonseka (2019) 'Decolonising German And European Union Foreign And Development Policies: Pragmatic Steps Towards Better Relations', *Pancanaka*, 1(September), p. 14.
- Drewski, D. and Gerhards, J. (2024) *A humanitarian role model, Framing Refugees*. Available at: <https://doi.org/10.1093/oso/9780198904724.003.0005>.
- Fadli, M.R. (2021) 'Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif', *Humanika*, 21(1), pp. 33-54. Available at: <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Fahham, A.M. and Kartaatmaja, A.M. (2014) 'Konflik Suriah: Akar Masalah dan Dampaknya', *Politica*, 5(1), pp. 37-60. Available at: <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/332>.
- Futák-Campbell, B. and Pütz, M. (2022) 'From the "Open door" policy to the EU-Turkey deal: Media framings of German policy changes during the EU refugee

- "crisis", *International Relations*, 36(1), pp. 61–82. Available at: <https://doi.org/10.1177/0047117821999413>.
- Heriamsal, K., Manurung, F.B. and Rahmat, R.K. (2024) 'Eksternalisasi Konflik Internal Yaman Dalam Kerangka Analisis Internationalization of Conflict Theory', *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 4(01), pp. 31–43. Available at: <https://doi.org/10.31947/hjirs.v4i01.32859>.
- Howarth, D. and Schild, J. (2022) 'Torn between Two Lovers: German Policy on Economic and Monetary Union, the New Hanseatic League and Franco-German Bilateralism', *German Politics*, 31(2), pp. 323–343. Available at: <https://doi.org/10.1080/09644008.2021.2003331>.
- Khaira, A.N., Yusra, M. and Dermawan, R. (2022) 'Persepsi Angela Merkel dan Open Door Policy dalam Krisis Pengungsi Eropa 2015', *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 18(1), pp. 1–13. Available at: <https://doi.org/10.26593/jihi.v18i1.4603.1-13>.
- Klaeden, E. Von (1990) 'German Foreign Policy: Parameters and Current Challenges', *20 Years After the Fall of the Berlin Wall*, pp. 39–46.
- Knappertz, S. (2021) "'One Country Alone Cannot Solve These Problems": German Leaderships' Role in European (Dis)Integration During Continuous Crisis', *Undergraduate Theses* [Preprint].
- Kundnani, H. and Parello-Plesner, J. (2012) 'China and Germany: Why the Emerging Special Relationship Matters for Europe', *European Council on Foreign Relations*, 55, pp. 1–16.
- Major, C. and Mölling, C. (2020) 'Europe, Germany and Defense: Priorities and Challenges of the German EU Presidency and the Way Ahead for European Defense', *Research Strategic*, 63(November). Available at: <https://www.frstrategie.org/sites/default/files/documents/publications/notes/2020/202063.pdf>.
- Maureen, D., Aling, R. and Senewe, E.V.T. (2024) 'Analisis Yuridis Krisis Pengungsi Rohingya Aceh dan Peran UNHCR di Indonesia Berdasarkan Hukum Organisasi Internasional', *Lex Privatum*, 14(3).
- Mila, Andriani. (2018). Kebijakan Jerman dalam Kebijakan Selamat Datang Pengungsi Tahun 2015. Universitas Brawijaya.
- Otero-iglesias, M. (2014) 'Working Paper Germany and political union in Europe : nothing moves without France', *Biennial Conference of the European Union Studies Association*, 14(August), pp. 1–24.
- Putri, Y.A., Haqqi, H. and Alchatib, S.R. (2022) 'Assessing the Implementation of Open-Door Policy in Managing Syrian Refugees in Germany (2015)', *International Journal of Innovative Research and Development*, 11(2), pp. 120–126. Available at: <https://doi.org/10.24940/ijird/2022/v11/i2/feb22045>.
- Setiabudi, C.S. (2021) 'Pengaruh Kebijakan Pengungsi Uni Eropa Terhadap Perkembangan Gerakan Eurosceptic Di Eropa', *Wanua: Jurnal Hubungan Internasional Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin*, 6(1), p. 81.
- Sherin, V., Nugrahaningsih, N. and Nuzulian, U. (2021) 'Faktor Penyebab Terbentuknya Stop Soros Law Sebagai Kebijakan Hungaria Terkait Masalah Migrasi', *SOVEREIGN: Jurnal Hubungan Internasional*, 3(1), pp. 1–20. Available at: <https://jurmafis.untan.ac.id/index.php/Sovereign/article/view/2673>.
- Sopamena, C.A. (2023) 'Pengungsi Rohingya Dan Potensi Konflik & Kemajemukan Horizontal Di Aceh', *Jurnal Caraka Prabhu*, 7(2), pp. 85–115. Available at: <https://doi.org/10.36859/jcp.v7i2.1927>.
- Sugiyono (2010) *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Tjaden, J. and Heidland, T. (2024) 'Did Merkel's 2015 decision attract more migration to Germany?', *European Journal of Political Research*, pp. 1–17. Available at: <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12669>.
- Weg, D., Germany, K. and Siebert, H. (2004) 'Kiel Institute for World Economics Germany in the European Union : Economic Policy under Ceded Sovereignty by Germany in the European Union, *Working Paper*, 1217(1217).
- Yeni, M.F. (2019) 'Motivasi Jerman Dalam Menerima Pengungsi Asal Suriah Pada Tahun 2015', *Frequency of International Relations (FETRIAN)*, 1(1), pp. 158–201. Available at: <https://doi.org/10.25077/fetrian.1.1.158-201.2019>.